

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**DIREKTORAT SARANA PRODUKSI
TAHUN 2010**



**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT SARANA PRODUKSI
JAKARTA, 2011**

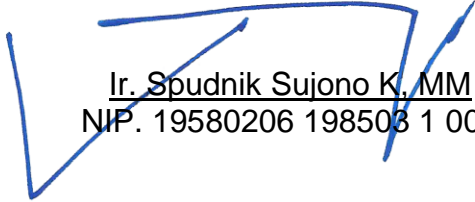
KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Sarana Produksi ini merupakan gambaran hasil kinerja selama tahun 2010. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Produksi dengan mengacu pada rencana strategis yang telah disusun. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2003.

Sebagai unit organisasi pemerintah yang memiliki visi dan misi untuk memfasilitasi tersedianya sarana produksi untuk sub sektor tanaman pangan, Direktorat Sarana Produksi telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsi untuk menghasilkan beberapa kebijakan di bidang penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida, alsintan dan kelembagaan serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik lingkup Departemen Pertanian maupun lintas sektoral.

Disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga diharapkan adanya masukan positif untuk penyempurnaannya.

Jakarta, Februari 2010
Direktur Sarana Produksi


Ir. Spudnik Sujono K, MM
NIP. 19580206 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
II. RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA	7
A. Rencana Stratejik	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran	7
3. Kebijakan	8
4. Program	8
B. Rencana Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan	12
B. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran	22
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	23
D. Analisis Keterkaitan Pencapaian Kinerja Kegiatan	35
E. Akuntabilitas Keuangan	37
F. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja	38
IV. PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
AKUNTABILITAS KINERJA PUPUK SUBSIDI	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka Direktorat Sarana Produksi telah menetapkan tujuan yaitu : Menyediakan pupuk dan pestisida sesuai dengan azas 6 (enam) tepat, Mengefektifkan pengawasan, penyediaan dan distribusi pupuk serta pengawasan peredaran pestisida, Mengembangkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik antara lain: Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat, Efektifnya pengawasan, penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida, Berkembangnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian, Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi, Bertumbuhkembangnya penggunaan pestisida ramah lingkungan/agen hayati, Terlaksananya penggunaan pestisida secara bijaksana.

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun 2010 antara lain: Terasiliasinya penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,970 juta ton, Terkawalnya bantuan 224 unit APPO dan 102 unit RP3O, Tersosialisasinya kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana di 33 provinsi, Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida di 33 provinsi, Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida di 21 provinsi, Terkawalnya kegiatan BUMA traktor roda 2 sebanyak 2.391 unit dan BAKAL peralatan bengkel sebanyak 228 paket, Terkoordinasinya petugas pengawas alsintan di 33 provinsi, Tersusunnya 2 jenis RSNi alsintan, Meningkatnya pemahaman petugas terhadap pengelolaan UPJA, Terpilihnya 5 kelompok UPJA berprestasi, Meningkatnya jumlah UPJA mandiri dan profesional sebesar 62%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut antara lain : belum optimalnya pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, masih terbatasnya petugas pengawas pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota, belum optimalnya pengelolaan alsintan serta kelembagaan sarana produksi.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan antara lain: melaksanakan realokasi pupuk bersubsidi dan menggunakan RDKK dalam penyaluran pupuk subsidi, meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan mendorong pembentukan KP3 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing serta meningkatkan peran Usaha Pelayanan Jasa Alsintan sebagai unit lembaga bisnis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, Pemerintah telah menetapkan sasaran produksi Tahun 2010 sebagai berikut: padi 66,680 juta ton GKG, jagung 19,800 juta ton pipilan kering, kedelai 1,300 juta ton biji kering, kacang tanah 0,882 juta ton biji kering, kacang hijau 0,360 juta ton biji kering, ubi kayu 22,248 juta ton ubi basah dan ubi jalar 2 juta ton ubi basah. Untuk mencapai sasaran produksi tanaman pangan tersebut diperlukan dukungan penyediaan sarana produksi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam rangka peningkatan produktivitas usahatani.

Dalam pengelolaan sarana produksi, peran pemerintah sangat diperlukan dalam regulasi dan fasilitasi penyediaan sarana produksi untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual di lapangan/ tingkat petani terutama isu kelangkaan dan harga pupuk yang tidak sesuai HET, banyaknya kasus pupuk dan pestisida ilegal, belum optimalnya pengembangan dan penggunaan alat mesin pertanian serta kinerja kelembagaan dan pelayanan jasa yang relatif masih rendah.

Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan sarana produksi Tahun 2010 antara lain:

- 1). Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas : Pengawasan Pengembangan Pupuk, Monitoring Penggunaan RDKK, Penyusunan Kebijakan Pupuk
- 2). Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) : Pembinaan dan Pengembangan Pestisida,
- 3).

Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen : Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian, Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsin dalam Rangka Pengembangan UPJA Center, Pendayagunaan Pengawasan Alsintan, Pengembangan Kelembagaan UPJA, Penilaian UPJA Berprestasi 4). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida, Pengawas Pupuk dan Pestisida 5) Pengembangan PUAP dan Penguatan: Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana produksi tersebut, telah dialokasikan anggaran melalui DIPA APBN Tahun 2010 sebesar Rp. 56.230.000.000,-

Selain itu, pada tahun 2010 Direktorat Sarana Produksi juga mengelola dana subsidi pupuk sebesar Rp. 11,4 triliun untuk kegiatan subsidi harga pupuk, bantuan langsung pupuk, pendampingan BLP serta pengawasan pupuk.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Direktorat Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana produksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sarana Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan dan pelayanan jasa.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan dan pelayanan jasa.
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan dan pelayanan jasa.
4. Pelaksanaan rekomendasi pendaftaran atau izin sarana produksi tanaman.
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan dan pelayanan jasa.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sarana Produksi terdiri dari 5 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Penyediaan Pupuk, Sub Direktorat Penyediaan Pestisida, Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Sub Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan Sub Direktorat Kelembagaan dan Pelayanan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Penyediaan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang penyediaan pupuk pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Penyediaan Pupuk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pupuk pertanian
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pupuk pertanian

- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pupuk pertanian
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pupuk pertanian.
2. Sub Direktorat Penyediaan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pestisida pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Penyediaan Pestisida menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pestisida pertanian
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pestisida pertanian
 - c. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pestisida pertanian
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan penyediaan dan distribusi pestisida pertanian
3. Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida pertanian
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida pertanian

- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan pupuk dan pestisida pertanian
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida pertanian
4. Sub Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan aplikasi alat dan mesin pertanian.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan aplikasi alat dan mesin pertanian.
 - c. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang perencanaan dan aplikasi alat dan mesin pertanian.
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan dan aplikasi alat dan mesin pertanian.
5. Sub Direktorat Kelembagaan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kelembagaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan & pelayanan jasa sarana produksi pertanian.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pelayanan jasa sarana produksi pertanian.

- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan & pelayanan jasa sarana produksi pertanian.
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan & pelayanan jasa sarana produksi pertanian.

Pada setiap atau masing-masing Sub Direktorat (Subdit) terdapat 2 (dua) Seksi, sebagai berikut :

- (1) Sub Direktorat Penyediaan Pupuk terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan
 - b) Seksi Distribusi
- (2) Sub Direktorat Penyediaan Pestisida terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan
 - b) Seksi Distribusi
- (3) Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida terdiri dari :
 - a) Seksi Pupuk
 - b) Seksi Pestisida
- (4) Sub Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan
 - b) Seksi Aplikasi
- (5) Sub Direktorat Kelembagaan dan Pelayanan terdiri dari:
 - a) Seksi Kelembagaan
 - b) Seksi Pelayanan Jasa

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategik

1. Visi dan Misi

Visi

Tersedianya sarana produksi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani.

Misi

- a. Memfasilitasi penyediaan dan pendistribusian pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat.
- b. Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida.
- c. Mengembangkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
- d. Mengembangkan kelembagaan dan pelayanan sarana produksi yang mandiri dan berkelanjutan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan program pengelolaan sarana produksi adalah:

- a. Menyediakan pupuk dan pestisida sesuai dengan azas 6 (enam) tepat.
- b. Mengefektifkan pengawasan, penyediaan dan distribusi pupuk serta pengawasan peredaran pestisida.
- c. Mengembangkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
- d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi.

Sasaran pelaksanaan program pengelolaan sarana produksi adalah :

- a. Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat.
- b. Efektifnya pengawasan, penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida.
- c. Berkembangnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
- d. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi.

- e. Bertumbuhkembangnya penggunaan pestisida ramah lingkungan/agen hayati
- f. Terlaksananya penggunaan pestisida secara bijaksana

3. Kebijakan

Kebijakan Direktorat Sarana Produksi Tahun 2010 difokuskan pada kegiatan antara lain :

- a. Melakukan pengamanan ketersediaan pupuk bersubsidi melalui kebijakan realokasi antar provinsi dan antar kabupaten.
- b. Mensosialisasikan pengembangan dan penggunaan pestisida hayati
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida di masing-masing daerah.
- d. Meningkatkan jumlah ketersediaan alat dan mesin pertanian sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing serta meningkatkan pengawasan peredarannya.
- e. Melakukan penguatan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan.

4. Program

Kegiatan Sarana Produksi Tahun 2010 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahunan Direktorat Sarana Produksi yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat

- a. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pupuk, kegiatan Pengembangan Pupuk Organik dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pestisida

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pupuk meliputi beberapa sub kegiatan antara lain:

- Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas terdiri dari:

- Pengawasan Pengembangan Pupuk
- Monitoring Penggunaan RDKK
- Penyusunan Kebijakan Pupuk

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pestisida dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan antara lain:

- Penyusunan Buku Pestisida Terdaftar
- Sosialisasi dan Pengembangan Pestisida Hayati
- Inventarisasi Pestisida Terdaftar
- Evaluasi Peredaran/Penggunaan Pestisida

c. Indikator sasaran yang ditetapkan adalah:

- Terasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 9,480 juta ton
- Terasilitasinya penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) jenis NPK , POG dan POC di 1.066.395 ha lahan.
- Terkawalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan 200 unit RP30 di 32 provinsi
- Tersosialisasinya kebijakan penggunaan pestisida secara bijaksana di 33 Provinsi

2. Efektifnya pengawasan, penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida.

a. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida meliputi beberapa sub kegiatan, yaitu:

- Sinkronisasi petugas pengawas pupuk dan pestisida
- Pengawasan pupuk
- Pengawasan pestisida

c. Indikator sasaran yang ditetapkan adalah:

- Tersosialisasinya peraturan pupuk dan pestisida di 33 provinsi.
- Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida dengan daerah di 33 provinsi.
- Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida di 33 provinsi

3. Berkembangnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

a. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen

b. Kegiatan Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen meliputi sub kegiatan:

- Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
- Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsintan dalam rangka Pengembangan UPJA Center
- Penyusunan dan pembahasan RSNi
- Pendayagunaan Pengawasan Alsintan
- Studi Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Alsintan Internasional
- Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor untuk Penanam Biji-bijian.

c. Indikator sasaran yang ditetapkan adalah

- Meningkatnya koordinasi petugas pengawas alsintan di 33 provinsi
- Terkawalnya pelaksanaan kegiatan BUMA 2.600 unit traktor roda 2, pompa air 3.300 unit dan BAKAL 250 paket peralatan bengkel.

4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi.

- a. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Alsintan
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Alsintan meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan Kelembagaan UPJA
 - Penilaian UPJA Berprestasi
- c. Indikator sasaran yang ditetapkan adalah
 - Meningkatnya tentang pengelolaan UPJA
 - Terpilihnya 5 Kelompok UPJA Berprestasi Tk Nasional
 - Meningkatnya jumlah UPJA yang mandiri dan profesional

5. Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan.

- a. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian
- b. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian meliputi sub kegiatan:
 - Pertemuan Koordinasi Persiapan Pembangunan Masyarakat Desa
 - Melaksanakan Apresiasi Pembangunan Masyarakat Desa
- c. Indikator sasaran yang ditetapkan adalah
Terberdayakannya Tenaga Muda Pertanian

Untuk mencapai sasaran tahun 2010, selain melalui kegiatan utama sebagaimana diuraikan sebelumnya, juga difasilitasi dengan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

- Fasilitasi Ketatausahaan
- Penyusunan program dan rencana kerja TA 2011
- Evaluasi Kegiatan TA 2010
- Pengadaan alat pengolahan data
- Pengadaan inventaris kantor

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Sarana Produksi pada tahun 2010 dilaksanakan terhadap 4 sasaran, 3 program, dan 5 kegiatan utama.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator kinerja yang terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka rencana tingkat capaian (target). Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengembangan Pupuk

1.1. Pengawasan Pupuk Bersubsidi

a. Realisasi Inputs

- Dana sebesar Rp. 684.541.590,- (81,75 %)
- Sumber Daya Manusia 65 orang

b. Realisasi Outputs

- Tersusunnya laporan hasil pengawasan pengembangan pupuk (100%)
- Tersedianya laporan RDKK (100%)
- Tersedianya Permentan Pupuk Bersubsidi sebanyak 3 Permentan (100%)
- Tersedianya Buku Pupuk Terdaftar (100%)

c. Realisasi Outcomes

- Terkawalnya pengembangan pupuk di 33 provinsi (100 %)
- Termonitoringnya Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok di 33 propinsi (100%)

- Tersosialisasinya Permentan Pupuk Bersubsidi di 33 propinsi (100%)
- Tersosialisasinya pupuk terdaftar di 33 propinsi (100 %)
- d. Realisasi Benefit
 - Penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani di 33 Provinsi (100%)
- e. Realisasi Impact
 - Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan pemupukan berimbang di tingkat petani.

1.2. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 185.504.710,- (96,32 %)
 - Sumber Daya Manusia 120 orang
- b. Realisasi Outputs
 - Tersedianya Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun 2011 sebanyak 150 eksemplar (100%) masih proses di Kementan
- c. Realisasi Outcomes
 - Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,867 juta ton (83,94%)
- d. Realisasi Benefit
 - Penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani di 33 Provinsi (100%)
- e. Realisasi Impact
 - Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan pemupukan berimbang di tingkat petani.

2. Pembinaan dan Pengembangan Pupuk Organik

2.1. Temu Teknologi Pupuk Organik

- a. Realisasi Inputs

- Dana sebesar Rp. 162.494.850,- (96,05%)
- SDM : 125 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya Pertemuan dan Workshop Teknologi Pupuk Organik (100%).
- c. Realisasi Outcomes
 - Terkoordinasinya pengembangan pupuk organik di 30 Provinsi (100%)
- d. Realisasi Benefit

Meningkatnya pengembangan pupuk organik.
- e. Realisasi Impact

Meningkatnya kesuburan lahan.

2.2. Temu Lapang Petani Organik

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 218.721.550,- (87,59%)
 - SDM : 250 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya Temu Lapang Petani Organik (100 %)
- c. Realisasi Outcomes
 - Berkembangnya penyediaan pupuk organik di 32 Provinsi (100%)
- d. Realisasi Benefit
 - Berkembangnya pemupukan organik di 32 Provinsi
- e. Realisasi Impact
 - Optimalnya penggunaan pupuk organik di 32 Provinsi.

2.2. Pengawasan Pengembangan Pupuk Organik

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 240.095.800,- (92,31%)

- SDM : 123 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Tersedianya Buku Pedoman Umum Pengembangan Pupuk Organik sebanyak 350 buku (100%)
 - Terlaksananya pengawalan dan monitoring pengembangan pupuk organik di 32 provinsi (100 %)
 - Tersusunnya Buku Laporan Pengawalan Pengembangan Pupuk Organik (100%)
- c. Realisasi Outcomes
 - Terkawalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan 224 unit APPO dan 102 unit RP3O di 32 provinsi (71%)
- d. Realisasi Benefit
Berkembangnya pemupukan organik di 32 Provinsi
- e. Realisasi Impact
Optimalnya penggunaan pupuk organik di 32 Provinsi.

3. Pembinaan dan Pengembangan Pestisida

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 291.830.000,- (98,72%)
 - SDM : 65 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya pembinaan penggunaan pestisida di provinsi;
 - Terlaksananya pertemuan sosialisasi pengembangan pestisida hayati (100 %)
 - Tersedianya Buku Pestisida Terdaftar sebanyak 575 eksemplar (100%);
 - Tersedianya laporan hasil pembinaan penggunaan pestisida (100%)
 - Tersedianya laporan pertemuan sosialisasi dan pengembangan pestisida hayati

- Tersedianya laporan sosialisasi dan pengembangan pestisida hayati
 - Tersedianya laporan inventarisasi pestisida
- c. Realisasi Outcomes
- Tersosialisasikannya pengembangan pestisida hayati
 - Tersosialisasinya pestisida terdaftar di 33 Provinsi (100%)
 - Tersosialisasinya kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana di 33 provinsi (100%)
- d. Realisasi Benefit
- Meningkatnya kemampuan petugas daerah dalam melakukan pembinaan pestisida
- e. Realisasi Impact
- Terlaksananya penggunaan pestisida sesuai azas 6 tepat

4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida

4.1. Pertemuan Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida

- a. Realisasi Inputs
- Dana sebesar Rp. 203.924.700,- (99,63%)
 - Sumber Daya Manusia 100 orang
- d. Realisasi Outputs
- Terselenggaranya pertemuan teknis petugas pengawas pupuk dan pestisida (100 %).
- e. Realisasi Outcomes
- Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida dengan Daerah di 33 Provinsi (100%).
- f. Realisasi Benefit
- Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida
- g. Realisasi Impact
- Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida

4.2. Pengawasan Pupuk

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 159.911.873,- (78,58 %)
 - Sumber Daya Manusia 65 orang
- b. Realisasi Outputs
 - Tersedianya Buku Kumpulan Peraturan Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebanyak 300 eksemplar (100 %)
 - Terlaksananya pembelian sampel pupuk sebanyak 0 contoh (0 %)
 - Tersedianya hasil analisis 66 sampel pupuk (33,85%)
 - Terlaksananya pengawasan pupuk di 11 Provinsi (99%)
- c. Realisasi Outcomes
 - Tersosialisasinya peraturan pupuk dan pestisida di 33 provinsi (100%)
 - Terpantaunya mutu 66 jenis pupuk (100%)
 - Optimalnya pengawasan pupuk di 33 Provinsi (100%)
- d. Realisasi Benefit
 - Terkendalinya peredaran pupuk di 33 Provinsi
- e. Realisasi Impact
 - Menurunnya kasus penyimpangan pupuk di 33 Provinsi.

4.3. Pengawasan Pestisida

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 87.477.100,- (42,78 %)
 - Sumber Daya Manusia 65 orang
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya pembelian sampel pestisida sebanyak 20 contoh (10 %)
 - Tersedianya hasil analisis 42 sampel pestisida (21 %)
 - Terlaksananya pengawasan pestisida di 10 Provinsi (99 %)

- c. Realisasi Outcomes
 - Terpantaunya mutu 42 jenis pestisida (21 %)
 - Optimalnya pengawasan pestisida di 33 Provinsi (100%)
- d. Realisasi Benefit
 - Terkendalinya peredaran pestisida di 33 Provinsi
- e. Realisasi Impact
 - Menurunnya kasus penyimpangan pestisida di 33 Provinsi.

5. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen

5.1. Apresiasi dan Koordinasi Petugas Pengawas Alsintan

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 143.822.000,- (97,40%)
 - Sumber Daya Manusia 100 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs

Terlaksananya pertemuan Apresiasi Petugas Pengawas Alsintan (100%)
- c. Realisasi Outcomes

Meningkatnya koordinasi petugas pengawas alsintan di 33 provinsi (100 %)
- d. Realisasi Benefit

Optimalnya pengawasan alsintan
- e. Realisasi Impact

Terbentuknya petugas pengawas alsintan yang profesional

5.2. Pengembangan Kepemilikan Alsintan

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 193.861.775,- (98,08%)
 - Sumber Daya Manusia 40 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs

- Tersedianya Pedoman Pelaksanaan BUMA traktor roda 2 dan BAKAL peralatan bengkel sebanyak 615 buku (100%);
 - Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan monitoring di 31 provinsi (100%)
 - Tersedianya laporan hasil kegiatan sebanyak 45 buku (100%),
- c. Realisasi Outcomes
- Tersosialisasinya pedoman pelaksanaan BUMA traktor roda 2 dan BAKAL peralatan bengkel di 30 Provinsi (100%)
 - Terkawalnya pelaksanaan kegiatan BUMA sebanyak 2.391 unit traktor roda 2 dan BAKAL sebanyak 228 paket peralatan bengkel (91%)
- c) Realisasi Benefit
- Meningkatnya kepemilikan alsintan yang dikelola UPJA
- d) Realisasi Impact
- Berkembangnya penggunaan alsintan secara optimal.

5.3. Penyusunan dan Pembahasan RSNi

- a. Realisasi Inputs
- Dana sebesar Rp. 67.220.600,- (77,18%)
 - Sumber Daya Manusia 30 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
- Terlaksananya rapat pembahasan RSNi sebanyak 3 kali (100%)
 - Terlaksananya rapat tim teknis sebanyak 3 kali (100%)
 - Tersedianya laporan RSNi sebanyak 80 eksemplar (100%)
 - Sosialisasi RSNi di 2 provinsi/ 4 kali (90%)
- c. Realisasi Outcomes
- Tersusunnya RSNi sebanyak 2 jenis alsintan (100%) , yaitu mesin pencampur bahan pupuk organik tipe auger horizontal dan mesin tanam bibit padi dorong (walking type rice transplanter)

- d. Realisasi Benefit
Meningkatnya kualitas alsintan
- e. Realisasi Impact
Optimalnya peredaran dan penggunaan alsintan

6. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Alsintan

6.1. Pertemuan Teknis Pengelolaan UPJA

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 148.828.750,- (96.36%)
 - Sumber Daya Manusia 100 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya Pertemuan Teknis Pengelolaan UPJA (100%).
 - Tersusunnya laporan pertemuan teknis pengelolaan UPJA (100%)
- c. Realisasi Outcomes
Meningkatnya pemahaman dan persepsi peserta pertemuan dari 30 Provinsi mengenai pengelolaan UPJA (91%)
- d. Realisasi Benefit
Meningkatnya kinerja aparat dan pengelola UPJA dalam optimalisasi usaha jasa
- e. Realisasi Impact
Terwujudnya profesionalisme aparat dalam pengembangan UPJA

6.2. Percepatan Kemandirian dan Profesionalisme UPJA

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 210.725.300,- (94.27%)
 - Sumber Daya Manusia 65 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Percepatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di 14 Provinsi (82,35 %).

- Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 10 kali (95 %).
 - Tersusunnya laporan hasil pengawalan percepatan (100%)
- c. Realisasi Outcomes
- Meningkatnya jumlah UPJA mandiri dan profesional (62 %)
 - Terinventarisirnya klasifikasi UPJA di 33 provinsi (100 %).
- d. Realisasi Benefit
- Meningkatnya peran UPJA sebagai lembaga usaha ekonomi pedesaan
- e. Realisasi Impact
- Meningkatnya wilayah usaha, asset dan pendapatan UPJA

6.3. Penilaian UPJA Berprestasi

- a. Realisasi Inputs
- Dana sebesar Rp. 145.011.998,- (97.81%)
 - Sumber Daya Manusia 45 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
- Terlaksananya penilaian UPJA Berprestasi di 10 Provinsi (100%)
 - Tersedianya Laporan Hasil Penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2009 (100%)
- c. Realisasi Outcomes
- Terpilihnya 5 kelompok UPJA Berprestasi Tk Nasional (100%)
- d. Realisasi Benefit
- Meningkatnya motivasi dan kinerja pengelola UPJA
- e. Realisasi Impact
- Terwujudnya kelembagaan UPJA yang mandiri dan profesional

B. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran dihitung dengan cara membandingkan angka realisasi terhadap rencana tingkat capaian dari masing-masing indikator sasaran dengan mempedomani Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 tepat dinilai dengan indikator sasaran:
 - “Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 9.373.000 ton” hanya terealisasi sebesar 7.970.212 ton (85,03%) sehingga pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 85,03%
 - “Terkawalnya pelaksanaan pengadaan 300 unit APPO dan 150 unit RP30 di 32 Provinsi” terealisasi 224 unit APPO dan 102 unit RP30 di 28 provinsi, sehingga pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 71 %
 - “Tersosialisasinya kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana di 33 Provinsi” terealisasi 33 Provinsi, sehingga pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 100%.
2. Efektifnya pengawasan, penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida dinilai dengan indikator sasaran, yaitu:
 - “Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida dengan daerah di 33 Provinsi” dengan realisasi 33 Provinsi (100 %).
 - Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida di 33 Provinsi dengan realisasi 21 Provinsi (63,6 %)
3. Berkembangnya pemanfaatan alat mesin pertanian dinilai dengan indikator sasaran

- Meningkatnya koordinasi petugas pengawas alsintan di 33 provinsi (100%),
 - Terkawalnya pelaksanaan kegiatan BUMA sebanyak 2.391 unit traktor roda 2 dan BAKAL sebanyak 228 paket peralatan bengkel (91%),
 - Tersusunnya RSNI 2 jenis alsintan (100%)
4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi dinilai dengan 3 indikator sasaran:
- Terpilihnya 5 Kelompok UPJA Berprestasi Tk. Nasional (100%)
 - Meningkatnya jumlah UPJA mandiri dan profesional (62%)
 - Terinventarisirnya klasifikasi UPJA di 30 Provinsi (81,82%)

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Gambaran kinerja Direktorat Sarana Produksi Tahun Anggaran 2010 disajikan dalam bentuk analisis pencapaian kinerja terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengembangan Pupuk

a. Pengawalan Pupuk Bersubsidi

- Dalam upaya penyediaan pupuk yang memenuhi azas 6 tepat, yaitu tepat waktu, mutu, jumlah, jenis, tempat dan harga, pemerintah pada tahun 2010 masih melanjutkan kebijakan subsidi pupuk yang ditujukan bagi petani, peternakan, pekebun dan pembudidayaan ikan atau udang. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, Superphos, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN Pupuk. Rincian jumlah pupuk yang disubsidi sbb: Urea 4.931.000 Ton, SP-18 850.000

Ton, ZA 849.749 Ton dan NPK 2.100.000 Ton dan Organik 750.000 ton.

- Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi ditetapkan melalui Permentan Nomor : 22/Permentan/SR.130/2/2010 menetapkan harga Superphos Rp. 1.250,-/kg. Permentan Nomor: 32/Permentan/SR.130/4/2010 adalah: Urea Rp. 1.600/kg, SP-36 Rp. 2.000/kg, ZA Rp. 1.450/kg dan NPK Rp. 2.300/kg dan pupuk organik Rp 700/kg..
- Pada tahun 2010, Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk diserahkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, sehingga proses pembayaran subsidi pupuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

b. Pengawasan Pengembangan Pupuk

Pupuk organik bermanfaat untuk kesuburan lahan pertanian, dengan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Disadari bahwa penggunaan pupuk anorganik pada suatu lahan pertanian, secara intensif dan dalam waktu yang lama, akan menyebabkan terjadinya degradasi mutu lahan. Oleh karena itu, untuk memecahkan permasalahan tersebut, pemerintah telah mendorong pengembangan dan penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian secara bertahap, agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil dan sekaligus memperbaiki lingkungan yang berkelanjutan.

Keberhasilan

- Pada tahun 2010 Pemerintah melaksanakan fasilitasi pembangunan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) sebanyak 200 unit yang dialokasikan di 200 kabupaten di 31 provinsi dan telah terealisasi.

- Direktorat Sarana Produksi telah menyusun buku Pedoman Umum Pupuk Organik dan hasil pengawalan pengembangan pupuk.

Kegagalan

- Petani lebih memilih menggunakan pupuk anorganik untuk menyuburkan tanamannya karena hasilnya lebih cepat terlihat.
- Petani menganggap penggunaan pupuk organik terlalu merepotkan karena selain pembuatannya memerlukan waktu yang lama, perlu jumlah/dosis yang banyak per hektarnya sehingga sulit membawanya ke lahan.
- Harga pupuk organik subsidi dinilai terlalu murah (Rp 500/kg) sehingga dapat menghambat pengembangan pupuk organik yang mereka produksi

Langkah Antisipatif

- Sosialisasi pengembangan pupuk organik perlu terus dilakukan secara kontinu agar petani dapat lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk organik
- Pemerintah daerah diharapkan peran aktifnya dalam memberikan penyuluhan dan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan pupuk organik
- Pemda perlu memberikan dukungan dan fasilitasi kepada petani untuk mengembangkan usaha pupuk organik.

2. Pembinaan dan Pengembangan Pestisida

Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar, terutama apabila telah melebihi ambang batas pengendalian dan ambang batas ekonomi. Namun demikian, mengingat pestisida merupakan bahan berbahaya yang mempunyai resiko tinggi

terhadap keselamatan manusia dan lingkungan, maka penggunaan pestisida perlu memperhatikan kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana dan memperhatikan azas 6 tepat.

Keberhasilan

- Direktorat Sarana Produksi telah menerbitkan dan menyebarluaskan buku Pestisida Terdaftar Untuk Pertanian dan Kehutanan untuk dipakai sebagai acuan bagi petugas daerah dalam melakukan pengawalan pestisida.
- Pada tahun 2010 ini telah dilakukan pertemuan sosialisasi dan pengembangan pestisida hayati yang diselenggarakan di Bogor dengan peserta dari 16 provinsi.

Kegagalan

- Jumlah pestisida terdaftar untuk pertanian semakin meningkat setiap tahunnya, namun pengelolaan pestisida belum mendapat perhatian yang memadai dari masyarakat, baik pengambil kebijakan, pelaku usaha maupun pengguna pestisida.
- Di beberapa provinsi mengalami kesulitan dalam mengelola/memusnahkan stok pestisida yang tidak layak pakai (ilegal, palsu, kadaluwarsa) yang terdapat di gudang Dinas Pertanian, baik itu berasal dari sisa bantuan/pengadaan yang sudah lama maupun pestisida ilegal/palsu hasil pengawasan yang ditarik dari peredaran.
- Beberapa jenis Agen Hayati yang telah dikembangkan di beberapa provinsi telah mendapat respon dari petani karena lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Namun penggunaan agen hayati tersebut belum berkembang luas karena terbatasnya sarana laboratorium dan kurangnya sosialisasi

Langkah Antisipatif

- Perlu ditingkatkan peran Komisi Pestisida dalam mengkoordinasikan pengelolaan pestisida mulai tahap pengadaan, distribusi, penyimpanan, penggunaan sampai tahap pemusnahan, serta perlunya dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan pestisida secara periodik.
- Untuk mengatasi stok pestisida yang tidak layak pakai yang ada di gudang Dinas Pertanian, perlu dikoordinasikan dengan Bapedalda setempat dalam pelaksanaan pemusnahannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Untuk mengembangkan agen hayati, perlu ditingkatkan fasilitasi terhadap sarana dan prasarana laboratorium serta kegiatan sosialisasi kepada petani.

3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Pupuk dan pestisida mempunyai peranan strategis di bidang pertanian dalam mendukung pencapaian produksi pangan di Indonesia. Kedua input produksi tersebut menjadi kebutuhan utama bagi petani sehingga kebutuhan pupuk dan pestisida setiap tahun meningkat. Namun semakin tingginya jumlah permintaan pupuk dan pestisida menjadi peluang beredarnya pupuk dan pestisida palsu serta ilegal yang tentunya sangat merugikan petani khususnya dan produksi pertanian pada umumnya.

Pengawasan yang dilakukan selama ini belum dapat mengimbangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat lapang. Hal ini disebabkan masih lemahnya perangkat peraturan di bidang pupuk dan pestisida serta keterbatasan petugas pengawas baik kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk mengurangi atau membatasi seminimal mungkin terjadinya kasus penyimpangan pupuk dan pestisida diperlukan pengawasan yang intensif di tingkat lapang baik di pusat maupun daerah. Dengan pengawasan dan dukungan serta koordinasi yang baik antar instansi

terkait serta memfungsikan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) diharapkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pupuk dan pestisida dapat diminimalisasi sehingga pupuk yang beredar dan digunakan oleh petani sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Keberhasilan

- Tahun 2010 ini telah dilaksanakan pertemuan sinkronisasi petugas pengawas pupuk dan pestisida dengan peserta PPNS, petugas KP3 se-Indonesia dan kepala dinas pertanian kabupaten pelaksana Smart Card.
- Telah disusun dan disebarluaskan Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Melalui penyebaran buku tersebut diharapkan petugas provinsi dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan di bidang pupuk dan pestisida, sehingga pengelolaan pupuk dan pestisida dapat dilaksanakan dengan baik.
- Telah dilaksanakan analisis sampel pupuk dan pestisida sehingga diharapkan pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan sesuai dengan kriteria mutu dan kualitas yang didaftarkan di Departemen Pertanian.
- Telah tersedia jaringan GPRS Smart Card yang berguna untuk meningkatkan efektifitas sasaran pemanfaatan subsidi pupuk.

Kegagalan

Masih maraknya penyimpangan yang terjadi di bidang pupuk maupun pestisida ditingkat lapang, hal ini disebabkan antara lain :

- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait maupun stake holders sehingga penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan riil (RDKK)

- Kurangnya jumlah laboratorium uji mutu yang terakreditasi untuk pelayanan analisa pupuk dan pestisida
- Belum optimalnya kinerja KP3 di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang antara lain disebabkan terbatasnya sarana dan anggaran yang tersedia untuk operasional di lapangan.
- Belum optimalnya penerapan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku penyimpangan pupuk dan pestisida
- Belum idealnya jumlah PPNS Pupuk dan Pestisida
- Minimnya sosialisasi tentang pupuk dan pestisida yang terdaftar secara baik dan benar kepada kios-kios pengecer
- Minimnya informasi dan sosialisai kepada petani maupun kios dalam pemahaman terhadap bahaya peredaran dan penggunaan pupuk maupun pestisida ilegal/palsu
- Belum diberdayakannya petugas pengawas, KP3 dan PPNS pupuk dan pestisida secara optimal, sehingga banyak pelanggaran /kasus-kasus pupuk dan pestisida tidak dapat diselesaikan secara hokum
- Koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan uji coba penyaluran benih dan pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali/smart card belum optimal
- Belum tersedianya dana langganan GPRS Telkomsel dan Lintasarta yang relatif mahal yaitu sebesar Rp. 691,2 juta. Disamping itu dana pemeliharaan peralatan, pelatihan, pembinaan, dan monitoring serta penyusunan RDKK juga belum tersedia

Langkah Antisipatif

- Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida secara optimal dan intensif baik oleh pengawas pusat, pengawas provinsi dan pengawas kabupaten/kota serta instansi yang berkompeten di bidang pengawasan pupuk dan pestisida,

dengan mendalami dan mencermati ketentuan-ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pupuk dan pestisida.

- Peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam penyempurnaan database RDKK, melalui pertemuan secara rutin dengan produsen pupuk dan kelembagaan penyuluhan guna menyusun RDKK sehingga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai data riil dan dapat dipersiapkan lebih awal dan akurat.
- Dalam menangani kasus-kasus pupuk dan pestisida ditingkat lapang perlu dukungan dan peran aktif Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak di lapangan. Sehingga terjalin koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah operasional pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida.
- Melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistim pengawasan sekaligus membentuk dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas di provinsa dan kabupaten/kota.
- Meningkatkan kemampuan dan memberdayaan PPNS secara maksimal serta peningkatan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Mengoptimalkan kinerja KP3, PPNS dan meningkatkan koordinasi antar pusat, provinsi, dengan KP3 kabupaten/kota sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya serta mendorong terbentuknya KP3 di provinsi dan kabupaten/kota
- Perlu dukungan dana yang cukup untuk langganan GPRS melalui telkomsel, pemeliharaan peralatan, pelatihan, pembinaan dan monitoring serta penyusunan RDKK

4. Pembinaan dan Pengembangan Alsintan

Penerapan teknologi mekanisasi pertanian dalam agroindustri sudah saat ini sangat diperlukan untuk mengatasi adanya keterbatasan daya dan kapasitas kerja manusia dalam beberapa tahapan proses produksi. Penerapan alat dan mesin pertanian yang tepat dan sesuai

harus didasarkan pada kondisi lahan dan sosial budaya petani. Aplikasi alat dan mesin pertanian akan memberikan banyak manfaat antara lain memenuhi kebutuhan tenaga kerja, memenuhi jadwal waktu tanam dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Pemilihan alsintan dan pemanfaatannya yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat secara baik dan benar diperlukan agar benar – benar optimal penggunaannya.

Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian perlu dilaksanakan. Dukungan pembinaan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian yang berkelanjutan dan terarah sangat diperlukan untuk pengembangan alsintan ke depannya, yang tentunya melibatkan seluruh stake holder yang terkait.

Berdasarkan Permentan No. 47/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2010 berupa fasilitasi dana bantuan sosial dengan sasaran kegiatan berkembangnya kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) dan Bidang Usaha Tanaman Pangan Lainnya dalam rangka mengembangkan usaha agribisnis di perdesaan.

Keberhasilan

- Pada tahun 2010 bantuan alsintan diperuntukkan bagi UPJA pada kegiatan Pilot Project pengembangan alsintan serta bantuan alsin BUMA dan BAKAL diluar Pilot Project pengembangan alsintan.
- Telah disusun RSNi alsintan sebanyak 2 jenis yaitu alsin alat penyangk bermotor dan alsin pembuat granul/butiran pupuk organik (granulator).
- Telah tersedia buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan kumpulan peraturan alsintan yang diharapkan dapat membantu petugas pelaksana pengawasan alsintan dalam melakukan pengawasan.

- Telah dilakukan studi kerjasama internasional ke Jepang dan China untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah di Indonesia tentang alsintan standar internasional.
- Pemerintah menyediakan dana tugas pembantuan untuk memfasilitasi penyediaan alat dan mesin pertanian melalui bantuan uang muka pembelian traktor roda 2 sebanyak 3.395 unit, terealisasi unit (.....%), pompa air sebanyak 3.300 unit dan bantuan peralatan bengkel sebanyak 250 paket dengan realisasi paket (.....%) di 32 provinsi dan 292 kabupaten.
- Sampai Desember Tahun 2010 untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa telah sampai pada tahap *Kegiatan Seleksi* meliputi : melakukan bedah proposal PMD yang masuk dari daerah dan diperkirakan bahwa pelaksanaan kegiatan regular hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tahap verifikasi jika memungkinkan

Kegagalan

- Belum berjalannya pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alsintan yang dilakukan oleh petugas pengawas alsintan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dikarenakan belum ada dukungan dana operasional untuk kegiatan program alsintan, baik dari dana APBN maupun APBD
- Sebagian provinsi pada umumnya lambat dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan bantuan karena lambatnya penyampaian laporan dari kabupaten/kota, realisasi kegiatan pengadaan umumnya dilakukan di akhir tahun anggaran, sebagian kabupaten/kota merubah spesifikasi bantuan alsintan serta UPJA yang diusulkan oleh SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ternyata tidak menyanggupi untuk melunasi kekurangan dari BUMA traktor roda dua
- Dalam pengajuan RSNI, subpanitia teknis kesulitan mencari kelengkapan data spesifikasi alsintan yang akan diusulkan, karena kurang partisipasinya produsen yang bersangkutan atau produsen tidak menghadiri undangan dalam rapat pembahasan RSNI,

Langkah Antisipatif

- Perlu adanya dukungan dana operasional bagi Petugas Pengawas Alsintan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan alsintan.
- Perlu diintesifikannya koordinasi antara provinsi dan kabupaten dalam menyampaikan laporan realisasi perkembangan kegiatan alsintan.
- Perlunya dukungan, masukan dan partisipasi aktif dari pihak produsen yang bersangkutan dalam rapat pembahasan RSNI.

5. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan usahatani kedepan diarahkan pada upaya untuk mendorong dan memotivasi serta memberdayakan petani dan kelompok tani atau Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi secara tepat agar dapat meningkatkan produksi maupun mutu produk serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Salah satu strategi dalam pendayagunaan dan pengembangan Alsintan pada tanaman pangan adalah melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Kelembagaan UPJA tersebut perlu dikelola dengan baik agar tumbuh dan berkembang secara mandiri dan profesional.

Keberhasilan

- a. Telah dilaksanakan Penilaian UPJA dan telah ditetapkan 5 (lima) Kelompok UPJA sebagai pemenang UPJA Berprestasi Tingkat Nasional 2009 melalui Keputusan Menteri Pertanian No : 3651/Kpts/KP.450/11/2010 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2010 bagi petani/kelompok tani dan kelompok masyarakat maka ditetapkan 5 (lima) kelompok UPJA sebagai Pemenang UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 yaitu :
 - 1) UPJA Tani Makmur , Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

- 2) UPJA Maju Bersama, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
 - 3) UPJA Swakarsa, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
 - 4) UPJA Harapan Makmur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) UPJA Pulau Lestari, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- b. Terinventarisirnya Klasifikasi UPJA di 33 Provinsi. Jumlah UPJA sampai dengan Desember 2010 mencapai 12.612 Kelompok UPJA, yang terdiri dari: 9.760 Kelas Pemula, 2.507 Kelas Berkembang dan 345 Kelas Profesional.

Kegagalan

Pengembangan Kelembagaan UPJA masih banyak mengalami hambatan yang disebabkan beberapa hal, antara lain:

- Fenomena bahwa UPJA yang selama ini berkembang hanya sebagai salah satu usaha kelompok, tidak berbisnis dan tidak mandiri. Yang mana pengelolaan Manajemen UPJA belum mengarah kepada usaha bisnis yang mandiri, profesional serta belum berbadan hukum.
- Kondisi keberadaan UPJA tumbuh dan berkembang melalui bantuan pemerintah maupun swadaya, kelompok UPJA menjadi tidak berkembang, mengalami stagnan, bahkan tidak aktif, dan tidak operasional lagi sedangkan sebagian lagi masih tetap eksis dan berkembang dengan baik, sehingga posisi UPJA terlihat lemah dan tidak mendukung perekonomian pedesaan.
- UPJA belum mengarah kepada UPJA Mandiri dan Profesional, sehingga sehingga belum menjadi pelaku ekonomi yang kuat di pedesaan.

Langkah Antisipatif

- Mengembangkan kelembagaan UPJA ke arah UPJA yang berorientasi bisnis, mandiri dan profesional.

- Menempatkan posisi UPJA sebagai Lembaga Ekonomi yang kuat di pedesaan.
- Mengoptimalkan penggunaan alsintan pra panen, panen dan pasca panen untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di didalam maupun di luar kelompok tani/Gapoktan.

D. Analisis Keterkaitan Pencapaian Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2010, yaitu tersedianya pupuk dan pestisida sesuai asas 6 tepat, efektifnya pengawasan pupuk dan pestisida, berkembangnya pemanfaatan alsintan serta meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan sarana produksi, didukung melalui program kerja Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas, Pembinaan dan Pengembangan Pestisida, Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen, Pembinaan dan Pengembangan Pupuk, Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Alsintan dengan kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pupuk telah memberikan hasil terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7.970.212 ton (85,03%), terkawalnya kegiatan bantuan unit RP30 di 28 provinsi (71 %), sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran tersedianya pupuk secara 6 tepat
2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pestisida telah memberikan hasil tersosialisasinya buku pestisida terdaftar di 33 provinsi (100%) dan terevaluasinya hasil pelaksanaan skrining pestisida di 9 (sembilan) provinsi (90 %), sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran tersedianya pestisida sesuai azas 6 tepat.
3. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida telah memberikan hasil optimalnya pengawasan pupuk dan perstisida di 21 Provinsi (63,6%) dan meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida

dengan daerah di 33 Provinsi (100%), sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran efektifnya pengawasan penyediaan, distribusi pupuk dan peredaran pestisida.

4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan alsintan memberikan hasil meningkatnya koordinasi petugas pengawas alsintan di 33 provinsi (100%), terkawalnya pelaksanaan kegiatan BUMA sebanyak 2.391 unit traktor roda 2 dan BAKAL sebanyak 228 paket peralatan bengkel (91%), tersusunnya RSNi 2 jenis alsintan (100%), sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran berkembangnya pemanfaatan alsin.
5. Kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan memberikan hasil meningkatnya pemahaman dan persepsi petugas tentang pengelolaan UPJA di 30 provinsi (91%), terinventarisirnya klasifikasi UPJA di 33 provinsi (100%), terpilihnya 5 kelompok UPJA Berprestasi Tk. Nasional (100%) dan meningkatnya jumlah UPJA mandiri dan profesional sebesar (62 %), sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa pengelolaan sarana produksi.

Untuk mencapai Visi Direktorat Sarana Produksi yaitu tersedianya sarana produksi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani, maka kinerja kegiatan masih perlu terus ditingkatkan.

E. Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Produksi TA 2010 dibiayai dana APBN yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp 189.793.000.000 (seratus delapan puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, telah

terrealisasi sebesar Rp. 80.795.296.505 (delapan puluh milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) atau 42,57 % dari jumlah anggaran. Secara rinci rencana dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Sarana Produksi Tahun 2010

No.	Program/Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas	2.250.000.000	2.050.000.880	91,11
A	Administrasi Kegiatan	120.000.000	117.121.380	97,60
B	Evaluasi dan laporan kegiatan	98.349.000	71.304.680	72,50
C	Pengadaan alat pengolahan data	64.000.000	63.046.150	98,51
D	Pengadaan inventaris kantor	16.000.000	15.064.100	94,15
E	Pengawasan pupuk dan pestisida	615.000.000	581.227.800	94,51
F	Pembinaan dan pengembangan pupuk	1.336.651.000	1.202.236.770	89,94
2	Pengendalian OPT	563.000.000	504.965.200	89,69
A	Pembinaan dan Pengembangan Pestisida	563.000.000	504.965.200	89,69
3	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen	157.080.000.000	77.846.261.405	49,56
A	Penyusunan program dan rencana kerja	145.000.000	118.673.895	81,84
B	Pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian	155.700.000.000	76.654.822.200	49,23
C	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan alsintan	438.200.000	385.697.860	88,02
D	Pembinaan dan pengembangan alsintan	796.800.000	687.067.450	86,23
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	29.900.000.000	394.069.020	1,32
A	Pembinaan dan pengembangan pupuk	500.000.000	463.226.000	92,65
B	Pemberdayaan tenaga muda pertanian	29.400.000.000	-	-
JUMLAH		189.793.000.000	80.795.296.505	42,57

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penggunaan biaya dalam mendukung kinerja Direktorat Sarana Produksi berkisar antara 0,70 % (Pembinaan dan pengembangan pupuk) s/d 82,03 % (pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian).

F. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan oleh Direktorat Sarana Produksi pada Tahun Anggaran 2009 melalui program Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

sebesar Rp.3.201.536.406,- telah memberikan output berupa tersedianya Permentan No. 50/2009 tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi tahun 2010, buku pedoman pelaksanaan pupuk bersubsidi tahun 2009, pedoman umum pengembangan pupuk organik, terkawalnya kegiatan bantuan APPO dan RP3O, terlaksananya pertemuan teknologi organik, pertemuan teknis penyediaan pupuk, buku pestisida terdaftar, terlaksananya rapat evaluasi skrining pestisida, terkawalnya kegiatan bantuan uang muka Traktor Roda 2, buku pedoman pelaksanaan BUMA dan BAKAL, tersusunnya RSNI 2 jenis alsintan, terlaksananya apresiasi dan koordinasi petugas pengawas alsintan buku kumpulan peraturan pupuk dan pestisida, terlaksananya pertemuan teknis petugas pengawas pupuk dan pestisida, terlaksananya pengujian mutu sampel pupuk dan pestisida, terlaksananya pertemuan teknis pengelolaan UPJA dan terlaksananya penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional.

BAB IV

PENUTUP

Direktorat Sarana Produksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah memberikan beberapa keberhasilan antara lain terfasilitasinya penyediaan pupuk bersubsidi, tersosialisasinya kebijakan pestisida, terkawalnya bantuan traktor roda 2 dan peralatan bengkel, serta terlaksananya penilaian UPJA berprestasi tingkat Nasional. Namun demikian, mengingat pengelolaan sarana produksi juga menjadi kewenangan berbagai instansi lain serta implementasi di lapangan sepenuhnya dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka sangat diperlukan koordinasi yang intensif, baik antar instansi terkait di pusat dan daerah maupun antara pusat dan daerah.

Kegagalan yang dialami dalam melaksanakan tupoksi antara lain belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi, belum berkembangnya penggunaan pupuk organik secara optimal, belum terlaksananya penggunaan pestisida secara bijaksana, masih terbatasnya petugas pengawas pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten/Kota serta belum optimalnya pengelolaan alsintan dan kelembagaan UPJA.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan pada tahun 2010 antara lain meningkatkan koordinasi penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bersama instansi terkait dan produsen pupuk, memantapkan sistim distribusi pupuk pola tertutup menggunakan RDKK yang akurat, mendorong pemupukan berimbang melalui penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik, meningkatkan kemampuan petugas daerah di bidang pupuk, pestisida dan pengelolaan alsintan serta mendorong pengembangan UPJA.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil kinerja Direktorat Sarana Produksi selama tahun 2010, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dan operasional serta penyusunan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2006 S/D 2010**

- Instansi** : Direktorat Sarana Produksi
- Visi** : Tersedianya sarana produksi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani
- Misi** :
 1. Memfasilitasi penyediaan dan pendistribusian pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat.
 2. Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida.
 3. Mengembangkan alat dan mesin pertanian
 4. Mengembangkan kelembagaan dan pelayanan sarana produksi yang mandiri dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Menyediakan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat	1. Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat.	- Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi - Terkawalnya pelaksanaan bantuan APPO dan RP3O - Tersosialisasinya kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana	1. Pengamanan ketersediaan pupuk subsidi melalui kebijakan realokasi antar prov. dan antar kabupaten serta menyediakan cadangan ppk.	- Peningkatan Ketahanan Pangan - Pengembangan Agribisnis - Peningkatan Kesejahteraan Petani	
2. Mengefektifkan pengawasan penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida	2. Efektifnya pengawasan penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida.	- Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida - Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida	2. Mensosialisasikan pengembangan dan penggunaan pestisida hayati serta pengujian efikasi pestisida		
3. Mengembangkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian	3. Berkembangnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	- Meningkatnya koordinasi petugas pengawas alsintan - Terkawalnya pelaksanaan BUMA dan BAKAL - Tersusunnya RSNI	3. Meningkatkan peran pemda dalam pengawasan pupuk dan pestisida di masing-masing wilayah.		
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan saprodi	4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan saprodi 5. Bertumbuhkembangnya penggunaan pestisida ramah lingkungan/agen hayati 6. Terlaksananya penggunaan pestisida secara bijaksana	- Terpilihnya UPJA Berprestasi Tingkat Nasional - Meningkatnya pemahaman pengelolaan UPJA - Meningkatnya jumlah UPJA mandiri dan profesional	4. Meningkatkan jumlah ketersediaan alsintan sesuai dgn karakteristik dan potensi wilayah msg2 serta meningkatkan pengawasan peredarannya 5. Melakukan klasifikasi dan meningkatkan koordinasi pembinaan UPJA		

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2010

Instansi : Direktorat Sarana Produksi

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan	
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 tepat	- Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi	9,480 jt ton	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pembinaan dan Pengembangan Pupuk 1). Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Input: - Dana - SDM Output: - Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk TA. 2010 - Tersusunnya Lap. Hasil Pengawasan Pupuk Bersubsidi - Terlaksananya Verifikasi Pupuk Bersubsidi Outcome: - Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk TA. 2010 - Tersedianya Lap. Hasil Pengawasan Pupuk Bersubsidi - Terfasilitasinya penyaluran pupuk sbsd Urea SP-18 ZA NPK Organik Benefit: Penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani Impact: Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan pemupukan berimbang di tingkat petani	RP. org ekspl ekspl prov ekspl ekspl ton ton ton ton ton ton Propinsi	500.000.000 41 196 - 14 196 - 9.480.749 4.931.000 850.000 849.000 2.100.000 750.000 33	33	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan	
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Terkawalnya pelaksanaan bantuan 200 unit RP3O		Pengembangan Agribisnis	Integrasi Tanam-Ternak, Kompos dan Biogas 1). Pengawalan Pengembangan Pupuk Input : - Dana - SDM Output : - Tersusunnya Buku pedoman Umum Pupuk Organik - Tersusunnya laporan hasil pengawalan pengembangan pupuk - Terfasilitasinya pembangunan RP3O Outcome : - Tersedianya Buku Pedoman Umum Pupuk Organik - Tersedianya Laporan Hasil Pengawalan Pengembangan pupuk - Terkawalnya pembangunan RP3O Benefit: Berkembangnya penggunaan pupuk organik Impact: Meningkatnya kesuburan lahan		RP. org ekpsl ekpsl unit ekpsl ekpsl kab/prov prov. %	318.994.000 125 315 - 200 315 - 31/200 31		
				2). Monitoring Penggunaan RDKK Input : - Dana - SDM Output : - Terlaksananya monitoring penggunaan RDKK Outcome : Tersedianya Buku Hasil Monitoring RDKK Benefit: Berkembangnya penggunaan RDKK Impact: Optimalnya penggunaan RDKK		RP. org prov ekspl prop prop	180.686.000 40 33 - 33 33		

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3). Penyusunan Kebijakan Pupuk	Input : - Dana - SDM Output : - Tersusunnya Permentan Pupuk Bersubsidi - Tersusunnya Buku Pupuk Terdaftar - Terlaksananya pertemuan evaluasi kebutuhan pupuk Outcome : - Tersedianya Permentan Pupuk Bersubsidi - Tersedianya Buku Pupuk Terdaftar Tahun 2010 - Tersedianya Lap. Hasil Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Benefit: Penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani Impact: Meningkatnya produksi tanaman pangan	RP. org jenis ekspl pkt jenis ekspl prov prop prop	496.971.000 40 3 468 1 3 468 32 32 32	
	- Tersosialisasinya kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana	33 provinsi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengendalian OPT Pembinaan dan Pengembangan Pestisida	Input : - Dana - SDM Output : - Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Pestisida - Terlaksananya inventarisasi pestisida terdaftar - Tersusunnya Buku Pestisida Terdaftar - Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan pengembangan pestisida hayati - Terlaksananya sosialisasi pestisida hayati - Tersusunnya bahan evaluasi peredaran/ penggunaan pestisida	RP. org prov. prov. ekspl pkt prov. ekspl	413.000.000 40 6 7 242 1 7 28	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Efektifnya pengawasan penyediaan, distribusi pupuk dan peredaran	- Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida	33 provinsi	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1). Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida	Outcome:			
	- Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida	33 provinsi						
					- Tersedianya lap. Pembinaan Penggunaan	ekspl	16	
					- Tersedianya lap. Inventarisasi Pestisida Terdaftar	ekspl	12	
					- Tersedianya Buku Pestisida Terdaftar	ekspl	242	
					- Tersedianya Lap. Hasil Pertemuan Sosialisasi dan pengembangan Pestisida	ekspl	6	
					- Tersedianya lap. Hasil kegiatan sosialisasi pestisida hayati	ekspl	13	
					- Tersedianya bahan evaluasi peredaran/ penggunaan pestisida	ekspl	28	
					- Tersedianya laporan hasil evaluasi peredaran/penggunaan pestisida	ekspl	28	
					Benefit:			
					- Meningkatnya kemampuan petugas drh dalam pembinaan pestisida	prop	33	
					Impact:			
					Terlaksananya penggunaan pestisida sesuai azas 6 tepat	prop	33	
					Input:			
					- Dana	RP.	306.584.000	
					- SDM	org	100	
					Output			
					- Terlaksananya pertemuan sinkronisasi petugas pengawas pupuk dan pestisida	pkt	1	
					- Tersusunnya Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida	ekspl	40	
					Outcome:			
					- Tersedianya rumusan pertemuan sinkronisasi petugas pengawas pupuk dan pestisida	ekspl	33	
					- Tersedianya Buku Saku Pengawasan Pupuk Pestisida	ekspl	40	
					Benefit:			
					Optimalnya pengawasan pupuk dan pesti	prov	33	
					Impact:			
					Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisi	prov	33	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2). Pengawasan Pupuk	Input: - Dana - SDM Output: - Terlaksananya pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida - Terlaksananya pembelian sampel pupuk - Terlaksananya analisis sampel pupuk - Terlaksananya pengawasan pupuk - Tersedianya jaringan GPRS Smart Card - Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk Outcome: - Terkawalnya ketersediaan peredaran pupuk - Tersedianya hasil analisa/pengujian pupuk - Optimalnya pengawasan pupuk - Tersedianya Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan pestisida Benefit: Terkendaliya peredaran pupuk Impact: Menurunnya kasus penyimpangan pupuk	RP. org prov contoh contoh prov prov/kab ekspl prov jenis prov ekspl prov prov prov prov	308.416.000 65 33 22 22 33 12/15 219 33 22 32 219 33 33	
				3). Pengawasan Pestisida	Input: - Dana - SDM Output: - Terlaksananya pembelian sampel pestisida - Terlaksananya analisis sampel pestisida - Terlaksananya pengawasan pestisida Outcome: - Optimalnya pengawasan pestisida - Tersedianya hasil analisa/pengujian pestisida Benefit: Terkendaliya peredaran pestisida Impact: Menurunnya kasus penyimpangan pestisida	RP. org contoh contoh prov prov jenis prop	150.000.000 65 39 39 33 33 39 33	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Berkembangnya pemanfaatan alsintan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya koordinasi Petugas Pengawas Alsin - Terkawalnya pelaksanaan kegiatan BUMA dan BAKAL - Tersusunnya RSNi alsin 	<p>33 provinsi</p> <p>2.600 traktor roda 2 250 pkt alat bengkel</p> <p>2 jenis alsin</p>	Ketahanan Pangan	<p>Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen</p> <p>1). Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (APBN-P 2010)</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsin (APBN-P TA-2010) - Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Alsin - Tersusunnya Lap. Pelaksanaan Bantuan Alsin - Terlaksananya Bantuan Traktor Roda-2 - Terlaksananya Bantuan Pompa Air <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Bantuan Traktor Roda-2 - Tersedianya Bantuan Pompa Air - Tersedianya Buku Pedoman Bantuan Alsin - Tersedianya Lap.Pelaksanaan Bantuan Alsin <p>Benefit:</p> <p>Meningkatnya Kepemilikan Alsin</p> <p>Impact:</p> <p>Berkembangnya Penggunaan Alsin Secara Optimal</p> <p>2). Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsin Dlm Rangka Pengembangan UPJA Center</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pilot Project Pengemb Alsin BUMA&BAKAL - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi - Tersedianya laporan akhir hasil kegiatan Alsin 	<p>Rp.</p> <p>org</p> <p>pkt</p> <p>ekspl</p> <p>ekspl</p> <p>unit</p> <p>unit</p> <p>prov</p> <p>prov</p> <p>RP.</p> <p>org</p> <p>ekspl</p> <p>prop</p> <p>ekspl</p>	<p>155.700.000.000</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>364</p> <p>24</p> <p>3.395</p> <p>3.300</p> <p>3.395</p> <p>3.300</p> <p>364</p> <p>24</p> <p>33</p> <p>33</p> <p>377.122.000</p> <p>40</p> <p>124</p> <p>30</p> <p>20</p>		

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3). Penyusunan RSNI Alsintan	Outcome: - Tersedianya Buku pedoman Pelaksanaan BUMA dan BAKAL Th. 2010 - Tersedianya Prosiding hasil pertemuan pelaks. pilot project bantuan alsin dlm rangka UPJA cent - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pilot Project BUMA dan BAKAL tahun 2010 - Tersedianya BUMA - Tersedianya BAKAL Benefit : - Meningkatnya kepemilikan alsin Impact: Berkembangnya penggunaan alsintan secara optimal Input: - Dana - SDM Output: - Terlaksananya rapat pembahasan RSNI - Terlaksananya rapat tim teknis RSNI - Tersusunnya RSNI Alsintan - Terlaksananya sosialisasi RSNI Outcome: - Tersedianya RSNI alsintan Benefit : - Meningkatnya kualitas alsintan Impact Optimalnya peredaran dan penggunaan alsintan	ekspl ekspl ekspl unit unit prov prov RP. org kali kali ekspl prov jenis prov prov	124 35 20 320 1.872 33 33 90.814.000 30 3 2 32 32 2 32 32	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4). Pendayagunaan Pengawasan Alsintan Input: - Dana - SDM Output: - Tersusunnya Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Alsintan - Terlaksananya pendayagunaan pengawas Alsintan - Tersusunnya Laporan Akhir Pendayagunaan Pengawas Alsintan Outcome: - Tersedianya Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Alsintan - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengawasan Alsintan Benefit : - Meningkatnya kemampuan petugas pengawas alsintan Impact Optimalnya Pengawasan Alsintan		RP. org ekspl prov ekspl ekspl ekspl prov prov	92.627.000 30 117 32 35 117 35 32 32	
				5). Studi Pengembangan Kerjasama dgn Lembaga alsin Internasional Input: - Dana - SDM Output: - Terlaksananya Studi Kerjasama Internasional - Tersusunnya laporan studi kerjasama Internasional Outcome: - Tersedianya Laporan Hasil Studi Pengembangan Kerjasama dgn Lembaga Internasional Benefit : Meningkatnya pengetahuan tentang alsintan Standar Internasional Impact Pemahaman petugas pelaksana kegiatan alsin dapat disosialisasikan di dalam negeri		RP. org kali ekspl ekspl	141.707.000 30 2 10 10	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan jasa dalam pengelolaan saprodi	- Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan UPJA	33 provinsi	Peningkatan Kesejahteraan Petani	6). Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor Utk Penanam Biji2an	Input: - Dana - SDM Output: - Tersusunnya Buku Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor utk Penanam Biji2an. - Tersedianya laporan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor utk Penanam Biji2an. Outcome: - Tersedianya Buku Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor utk Penanam Biji-bijian - Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor utk Penanam Biji2an. Benefit : Tersosialisasikannya peningkatan Pemanfaatan Traktor untuk Penanam Biji-bijian Impact Bertambahnya jenis alsin yang dapat dimanfaatkan petani	RP. org	94.530.000 30	
	- Terpilihnya UPJA Berprestasi tingkat nasional	5 kelompok					ekspl ekspl	39 14
	- Meningkatnya jumlah UPJA mandiri dan profesional	50%		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan UPJA	Input : - Dana - SDM Output - Tersusunnya Pedoman Pengembangan UPJA - Laporan UPJA Outcome: Tersedianya Pedoman Pengembangan UPJA Tersedianya Laporan UPJA Benefit: Meningkatnya pengetahuan pengelola UPJA Impact: Terwujudnya profesionalisme aparat dlm pengelolaan UPJA	RP. org	252.772.000 100	
						ekspl ekspl	80 82	
						ekspl ekspl	80 82	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan	2). Penilaian UPJA Berprestasi	Input : - Dana - SDM Output : - Terlaksananya penilaian UPJA Berprestasi - Tersedianya laporan hasil penilaian UPJA : Outcome : - Terpilihnya UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Benefit: Meningkatnya motivasi dan kinerja UPJA Impact: Terwujudnya kelembagaan UPJA yang mandiri dan profesional	RP. org prop ekspl kelp %	185.428.000 45 10 22 5	
				1). Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian	Input : - Dana - SDM Output : - Tersusunnya Pedoman Umum PMD - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Persiapan PMD - Terlaksananya Bedah proposal, Finalisasi PMD, Workshop PMD dan Apresiasi PMD Outcome : Tersedianya Pedoman Umum PMD Tersedianya laporan akhir kegiatan PMD Benefit: Meningkatnya Peran serta pemuda dalam membangun desa Impact: Terwujudnya pembangunan masyarakat pedesaan secara utuh	RP. org prov kali pkt prov % %	29.400.000.000 65 - - 1 33	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2010

Instansi : Direktorat Sarana Produksi

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pembinaan dan Pengembangan Pupuk 1). Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Input: - Dana - SDM Output: - Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun 2010 - Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi - Terlaksananya Verifikasi Pupuk Bersubsidi Outcome: - Tersosialisasinya Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk TA.2010 - Terfasilitasinya penyaluran pupuk sbds Urea SP-18 ZA NPK Organik Benefit: Penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani Impact: Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan pemupukan berimbang di tingkat petani	 RP. org ekspl prov prov prov ton ton ton ton ton ton Propinsi Propinsi	 500.000.000 41 196 33 14 33 9.480.749 4.931.000 850.000 849.749 2.100.000 750.000 33 33	 450.031.520 41 196 33 14 33 7.179.883 4.153.210 639.039 696.879 1.449.304 241.451 33 33	 90,01 100 100 100 100 100 75,73 84,23 75,18 82,01 69,01 32,19 100,00 	

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
Pengembangan Agribisnis	Integrasi Tanam-Ternak, Kompos dan Biogas 1). Pengawasan Pengembangan Pupuk	Input :					
		- Dana	RP.	318.994.000	286.958.475	89,96	
		- SDM	org	125	125	100,00	
		Output :					
		- Tersusunnya Buku Pedoman Umum Pupuk Organik	ekspl	315	315	100,00	
		- Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Pengembangan Pupuk	ekspl	0	-	0,00	
		- Terfasilitasinya pembangunan RP30	unit	200	89	44,50	
		Outcome :					
		- Tersosialisasinya Buku Pedoman Umum Pupuk organik	prov	33	33	100,00	
		- Termanfaatkannya RP30	unit	200	89	44,50	
		Benefit:					
		Berkembangnya penggunaan pupuk organik	prov/kab	31/200			
		Impact:					
		Meningkatnya kesuburan lahan	%				
		2). Monitoring Penggunaan RDKK	Input :				
- Dana	RP.		180.686.000	151.278.700	83,72		
- SDM	org		40	40	100,00		
Output :							
- Terlaksananya Monitoring penggunaan RDKK	prov		33	33	100,00		
Outcome :							
- Tersedianya Buku Hasil Monitoring RDKK	ekspl		-	-	0,00		
Benefit:							
Berkembangnya penggunaan RDKK	prov		33				
Impact:							
Optimalnya penggunaan RDKK	prov		33				
3). Penyusunan Kebijakan Pupuk	Input :						
	- Dana		RP.	496.971.000	449707225	90,49	
	- SDM		org	40	40	100,00	

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
		Output : - Tersusunnya Permentan Pupuk Bersubsidi - Tersusunnya Buku Pupuk Terdaftar - Terlaksananya pertemuan evaluasi kebutuhan pupuk Outcome : - Tersedianya Permentan Pupuk Bersubsidi - Tersedianya Buku Pupuk Terdaftar - Tersedianya data Perencanaan Kebutuhan ppk Benefit: Meningkatnya penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani Impact: Meningkatnya produksi tanaman pangan	jenis ekspl pkt jenis ekspl prov prov prop	3 468 1 3 468 33 32 32	3 468 1 3 468 33 32 32	100,00 100 100,00 100 100 100 	

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi			
4	5	6	7	8			9	
Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengendalian OPT Pembinaan dan Pengembangan Pestisida	Input :						
		- Dana	RP.	413.000.000	405.017.195	98,07		
		- SDM	org	40	40	100,00		
		Output :						
		- Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Pestisida	prov	6	6	100,00		
		- Terlaksananya inventarisasi pestisida terdaftar	prov	7	7	100,00		
		- Tersusunnya Buku Pestisida Terdaftar	ekspl	242	242	100,00		
		- Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan pengembangan pestisida hayati	pkt	1	1	100,00		
		- Terlaksananya sosialisasi pestisida hayati	prov	7	7	100,00		
		- Tersusunnya bahan evaluasi peredaran/ penggunaan pestisida	ekspl	28	28	100,00		
		Outcome:						
		- Tersosialisasinya Pembinaan Penggunaan	prov	33	33	100,00		
		- Tersosialisasinya Buku Pestisida terdaftar	Prov	33	33	100,00		
- Tersosialisasinya Pengembangan Pest.Hayati	Prov	33	33	100,00				
- Tersosialisasinya kegiatan pestisida hayati	prov	33	33	100,00				
- Termonitornya peredaran/penggunaan pestisida	prov	33	33	100,00				
Benefit:								
- Meningkatnya kemampuan petugas drh dalam pembinaan pestisida	prop	33						
Impact:								
- Terlaksananya penggunaan pestisida sesuai azas 6 tepat	prop	33						

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
Peningkatan Kesejahteraan Petani	1). Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida	Input:					
		- Dana	RP.	306.584.000	301.929.500	98,48	
		- SDM	org	100	65	65,00	
		Output					
		- Terlaksananya pertemuan sinkronisasi petugas pengawas pupuk dan pestisida	pkt	1	1	100,00	
		- Tersusunnya Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida	ekspl	40	40	100,00	
		Outcome:					
		- Meningkatnya sinkronisasi petugas pengawas pupuk dan pestisida	prov	33	33	100,00	
		- Tersosisisasinya Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida	prov	33	33	100,00	
		Benefit:					
	Optimalnya pengawasan pupuk dan pesti	prop	33				
	Impact:						
	Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisi	prop	33				
	2). Pengawasan Pupuk	Input:					
- Dana		RP.	308.416.000	290.821.800	94,30		
- SDM		org	65	65	100,00		
Output:							
- Terlaksananya pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida		prov	-	-	#DIV/0!		
- Terlaksananya pembelian sampel pupuk		contoh	22	22	100,00		
- Terlaksananya analisis sampel pupuk		contoh	22	22	100,00		
- Terlaksananya pengawasan pupuk		prov	33	33	100,00		
- Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk	ekspl	219	219	100,00			
Outcome:							
- Terkawalnya ketersediaan peredaran pupuk dan pestisida	prov	33	33	100,00			
- Tersedianya hasil analisa/pengujian pupuk	jenis	22	22	100,00			
- Optimalnya pengawasan pupuk	prov	33	33	100,00			
- Tersedianya Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida	ekspl	219	219	100,00			

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
	3). Pengawasan Pestisida	Benefit: Terkendaliya peredaran pupuk Impact: Menurunnya kasus penyimpangan pupuk Input: - Dana - SDM Output: - Terlaksananya pembelian sampel pestisida - Terlaksananya hasil analisis sampel pupuk - Terlaksananya pengawasan pestisida Outcome: - Optimalnya pengawasan pestisida - Tersedianya hasil analisa/pengujian pestisida Benefit: Terkendaliya peredaran pestisida Impact: Menurunnya kasus penyimpangan pestisida	prop prop RP. org contoh contoh prov prov jenis prop prop	33 33 150.000.000 65 39 39 33 33 39 33 33	117.248.165 65 39 39 33 21 39 33 33	78,17 100,00 100,00 100,00 100,00 63,64 100,00 33 33	
Ketahanan Pangan	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen 1). Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (APBN-P 2010)	Input : - Dana - SDM Output: - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan (APBN-P) - Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Alsintan - Tersusunnya Lap. Pelaksanaan Bantuan Alsintan - Terlaksananya Bantuan traktor Roda-2 - Terlaksananya Bantuan Pompa Air	Rp. org pkt ekspl ekspl unit unit	155.700.000.000 100 1 364 24 3.395 3.300	1,45424E+11 100 1 364 24 3.395 3.300	93,40 100 100 100 100 100	

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
		Outcome: Terkoordinasinya Pelaks. Bantuan alsin - Tersedianya Bantuan Traktor Roda-2 - Tersedianya Bantuan Pompa Air - Tersedianya Buku Pedoman Bantuan Alsintan - Tersedianya Lap. Pelaksanaan Bantuan Alsintan	prov unit unit ekspl ekspl	33 3.395 3.300 364 24	33 3395 3300 364 24	100 100 100 100 100	
		Benefit: Meningkatkan Kepemilikan Alsintan	prov	33			
		Impact: Berkembangnya Penggunaan Alsintan Secara Optimal	prop	33			
	2). Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsintan Dim Rangka Pengembangan UPJA Center	Input: - Dana - SDM	RP. org	377.122.000 40	354.862.155 40	94,10 100	
		Output: - Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pilot Project Pengemb. Alsintan BUMA&BAKAL - Terlaksananya pertemuan Koordinasi - Tersusunnya laporan akhir hasil kegiatan Alsintan	ekspl prov ekspl	124 30 20	124 30 20	100 100 100	
		Outcome: "- Terkoordinasinya pelaksanaan Bantuan Alsintan - Tersedianya BUMA - Tersedianya BAKAL	prov unit unit	31 320 1.872	31 320 1.872	100 100 100	
		Benefit : - Meningkatnya kepemilikan alsintan	%				
		Impact: Berkembangnya penggunaan alsintan secara optimal	prov				

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
	3). Penyusunan RSNI Alsintan	Input: - Dana - SDM Output: - Terlaksananya rapat pembahasan RSNI - Terlaksananya rapat tim teknis RSNI - Tersedianya Laporan RSNI - Terlaksananya sosialisasi RSNI Outcome: - Tersusunnya RSNI alsintan Benefit : - Meningkatnya kualitas alsintan Impact Optimalnya peredaran dan penggunaan alsintan	RP. org kali kali ekspl prov jenis	90.814.000 30 3 2 32 33 2	72.655.100 30 3 2 32 33 2	80,00 100 100 100 100 100 100	
	4). Pendayagunaan Pengawasan Alsintan	Input: - Dana - SDM Output: - Tersusunnya Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Alsintan - Terlaksananya pendayagunaan pengawasan Alsintan - Tersusunnya Laporan Akhir Pendayagunaan Pengawas Alsintan Outcome: Meningkatnya pemahaman petugas alsin Benefit : Meningkatnya kemampuan petugas pengawas alsintan	RP. org ekspl pkt ekspl prov	92.627.000 30 117 1 35 33	78.509.665 30 117 1 35 33	84,76 100 100 100 100 100	

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi			
4	5	6	7	8			9	
	5). Studi Pengembangan Kerjasama dgn Lembaga Alsintan Internasional	<p>Impact Optimalnya Pengawasan Alsintan</p> <p>Input: - Dana - SDM</p> <p>Output: - Terlaksananya studi kerjasama Internasional - Tersusunnya lap. Studi kerjasama Internasional</p> <p>Outcome: Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Alsintan Internasional</p> <p>Benefit : Meningkatnya pengetahuan ttg alsintan standar internasional</p> <p>Impact Pemahaman petugas pelaksana kegiatan alsintan dapat disosialisasikan di dalam negeri</p>						
	6). Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor Utk Penanam Biji2an	<p>Input: - Dana - SDM</p> <p>Output: - Tersusunnya Buku Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor utk Penanam Biji-bijian - Tersusunnya Laporan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor utk Penanam Biji-bijian</p> <p>Outcome: Tersosialisasikannya peningkatan pemanfaatan traktor untuk penanam biji-bijian</p> <p>Benefit : Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan traktor untuk penanam biji-bijian</p> <p>Impact Bertambahnya jenis alsin yang dapat dimanfaatkan petani</p>						
			RP.	141.707.000	102.429.300	72,28		
			org	30	30	100		
			kali	2	2	100		
			ekspl	10	10	100		
						#DIV/0!		
			RP.	94.530.000	93.984.260	99,42		
			org	30	30	100		
			ekspl	39	39	100		
			ekspl	14	14	100		
			prov	33	33	100		

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi			
4	5	6	7	8			9	
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 1). Pengembangan Kelembagaan UPJA 2). Penilaian UPJA Berprestasi	Input :						
		- Dana	RP.	252.772.000	232.224.100	92		
		- SDM	org	100	100	100		
		Output						
		- Tersusunnya Pedoman Pengembangan UPJA	ekspl	80	80	100		
		- Tersusunnya Lap. UPJA	ekspl	82	82	100		
		Outcome:						
		- Tersedianya Pedoman Pengembangan UPJA	ekspl	80	80	100		
		- Laporan UPJA	ekspl	82	82	100		
		Benefit:						
		Meningkatnya kinerja aparat dan pengelola UPJA						
		Impact:						
		Terwujudnya profesionalisme aparat dlm pengelolaan UPJA						
		Input :						
- Dana	RP.	185.428.000	184.853.340	100				
- SDM	org	45	45	100				
Output :								
- Terlaksananya penilaian UPJA Berprestasi	prov	10	10	100				
- Tersedianya laporan hasil penilaian UPJA :	ekspl	22	22	100				
Outcome :								
- Terpilihnya UPJA Berprestasi Tingkat Nasional	kelp	5	5	100				
Benefit:								
Meningkatnya motivasi dan kinerja UPJA	%							
Impact:								
Terwujudnya kelembagaan UPJA yang mandiri dan profesional								

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi		
4	5	6	7	8			9
Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan	3). Percepatan Kemandirian dan Profesionalisme UPJA	Input : - Dana - SDM Output : - Tersusunnya Pedoman UMUM PMD - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi persiapan PMD - Terlaksananya bedah proposal, finalisasi PMD Workshop PMD dan Apresiasi PMD Outcome : Terasilitasinya kegiatan PMD Benefit: Meningkatnya peranserta pemuda dalam membangun pedesaan Impact: Terwujudnya pembangunan masyarakat pedesaan secara utuh	RP. org ekspl kali kali unit % %	29.400.000.000 65	5.578.841.100 65	18,98 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2010**

Instansi : **Direktorat Sarana Produksi**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi	Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 tepat	- Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi	9.480.749	7.179.883	75,73	
	- Terkawalnya bantuan RP3O	200 unit	89 unit	45%	
	- Tersosialisasinya kaidah penggunaan pestisida secara bijaksana	33 prop.	33 prop	100%	
Efektifnya pengawasan penyediaan, distribusi pupuk dan peredaran pestisida	- Meningkatnya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida	33 prop.	33 prop.	100%	
	- Optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida	33 prop	21 prop	63,64%	
Berkembangnya pemanfaatan alsintan	- Meningkatnya koordinasi petugas pengawas alsintan	33 prop	33 prop	100%	
	- Terkawalnya kegiatan BUMA dan BAKAL	29 prov	200 kab		1
	* BUMA Traktor Roda 2	320 unit	320 unit	100%	
	* BAKAL Peralatan Bengkel	1.872 unit	1.872 unit	100%	
	- Tersusunnya RSNi alsintan	2 jenis	2 jenis	100%	
Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pelayanan pengelolaan saprodi	- Terpilihnya UPJA Berprestasi Tingkat Nasional	5 Unit	5 Unit	100%	
	- Meningkatnya pemahaman aparat thd pengelolaan UPJA	33 Prop	33 Prop	100%	
	- Meningkatnya jml UPJA profesional	100%	62%	62%	
	- Terbentuknya UPJA Center	320 unit	320 unit		100%

**AKUNTABILITAS KINERJA
PENGELOLAAN SUBSIDI PUPUK**

A. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

1. Pelaksanaan Subsidi Pupuk

1.1. Subsidi Harga Pupuk

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 14.194.522.701.503,-(86,24%)
 - Sumber Daya Manusia 40 orang (100%)
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya penyaluran pupuk subsidi sebesar 7.970.212 ton (85,03%), terdiri dari Urea 4.650.627 Ton (84,56%), Superphos sebesar 707.002 Ton (70,70%), ZA 917.733 Ton (99,43%), NPK 1.450.943 Ton (96,73%) dan Organik sebesar 243.907 Ton (54,20%).
- c. Realisasi Outcomes
 - Terlaksananya pembayaran subsidi pupuk sebesar Rp. 14.194.522.701.530,- (86,24%)
- d. Realisasi Benefit
 - Meningkatnya kemampuan petani membeli pupuk dengan harga terjangkau
- e. Realisasi Impact
 - Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan
 - Meluasnya penerapan pemupukan berimbang di tingkat petani.
 - Meningkatnya kinerja perusahaan pupuk
 - Meningkatnya pendapatan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya

1.2. Bantuan Langsung Pupuk

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp. 537.228.514.708,- (33,35%)
 - Sumber Daya Manusia 30 orang
- b. Realisasi Outputs
 - Terlaksananya penyaluran Bantuan Langsung Pupuk meliputi Pupuk Organik Granul 102.574.800 kg (32,06%), Pupuk Organik Cair sebesar 683.832 liter (32,06%), dan pupuk NPK sebesar 34.191.600 kg (32,06%).
- c. Realisasi Outcomes
 - Terlaksananya pembayaran Bantuan Langsung Pupuk sebesar Rp 537.228.514.708,- (33,35%)
- d. Realisasi Benefit
 - Meningkatnya jumlah petani yang mengetahui dan menggunakan pupuk majemuk dan pupuk organik dalam usahatani padi
- e. Realisasi Impact
 - Meningkatnya kesuburan lahan
 - Meningkatnya produktivitas dan kualitas gabah (padi)
 - Meningkatnya pendapatan usahatani padi

2. Pembinaan dan Pendampingan BLP

- a. Realisasi Inputs
 - Dana sebesar Rp.19.537.408.091,- (73,13%)
 - Sumber Daya Manusia 75 orang
- b. Realisasi Outputs
 - Tersedianya Permentan Pedum BLP sebanyak 30 eksemplar (100%)
 - Terlaksananya survey harga pupuk BLP di 13 provinsi (100%)

- Terlaksananya verifikasi dokumen tagihan BLP sebanyak 7 kali (100%)
 - Terlaksananya rapat sosialisasi dan koordinasi BLP wilayah Barat (DIY) dan wilayah Timur (Bali) (100%)
 - Terlaksananya pemantauan BLP di 26 provinsi (100%)
 - Terlaksananya rapat evaluasi BLP di Batam (100%)
- c. Realisasi Outcomes
- Tersosialisasi dan terkoordinasinya pelaksanaan program BLP di 26 provinsi (100%).
 - Terkawalnya pelaksanaan program BLP di 26 provinsi (100%)
- d. Realisasi Benefit
- Tersalurnya BLP kepada kelompok tani sasaran
- e. Realisasi Impact
- Meningkatnya pengetahuan petani terhadap penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik

3. *Pengawasan Pupuk*

- a. Realisasi Inputs
- Dana sebesar Rp. 7.976.846.509,- (41.68 %)
 - Sumber Daya Manusia 6.395 orang
- b. Realisasi Outputs
- Terbentuknya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di 33 Provinsi (100 %) dan 392 Kabupaten (79.35 %)
- c. Realisasi Outcomes
- Terlaksananya koordinasi dan pengawasan pupuk oleh KP3 di 30 provinsi (90,91%) dan 250 kabupaten (63,78%).
- a. Realisasi Benefit
- Optimalnya Kinerja KP3, PPNS dan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida di 30 provinsi (90,91%) dan 250 kabupaten (63,78%).

- b. Realisasi Impact
 - Peredaran dan penggunaan pupuk di tingkat petani sesuai ketentuan.

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja terhadap kegiatan pengelolaan subsidi pupuk adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Pupuk

- Alokasi anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp. 17.534.582.658.000,- dan mendapat tambahan melalui Stimulus Fiskal/APBN-P tahun 2009 sebesar Rp. 995.217.551.000,-, untuk kekurangan pembayaran subsidi tahun 2007 dan 2008.
- Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dilaksanakan oleh BUMN Pupuk yang terdiri dari PT.Pupuk Sriwidjaya, PT.Pupuk Kalimantan Timur, PT.Pupuk Kujang, PT.Pupuk Iskandar Muda dan PT.Petrokimia Gresik.
- Pada tahun 2009, Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk diserahkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, sehingga proses pembayaran subsidi pupuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Keberhasilan

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melaksanakan pembayaran subsidi pupuk kepada BUMN Pupuk berdasarkan penyaluran pupuk subsidi tahun 2009 sebesar Rp. 14.194.522.701.530,- (86,24%) dari alokasi anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp. Rp. 16.458.767.696.000,-.

- Jumlah pembayaran subsidi pupuk tersebut baru 95% dari yang ditagihkan, dan pemerintah akan membayar 100% apabila telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kegagalan

- Perencanaan kebutuhan pupuk yang dibangun secara bottom up dengan menggunakan RDKK belum didukung dengan kompilasi data base yang akurat dari daerah.
- Pemanfaatan dan penggunaan pupuk bersubsidi masih bersifat umum, dan belum terinci menurut subsektor, karena data RDKK yang dijadikan acuan masih lebih didominasi untuk komoditi tanaman pangan.

Langkah Antisipatif

- Dalam penyusunan rencana kebutuhan pupuk menggunakan RDK dan RDKK, harus dibimbing oleh petugas penyuluh pertanian atau petugas Dinas Pertanian setempat.
- Peningkatan efisiensi penggunaan pupuk melalui pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- Distribusi pupuk dilaksanakan secara tertutup menggunakan RDKK dan meningkatkan peran Gapoktan sebagai penyalur pupuk subsidi di lini IV
- Penguatan industri pupuk melalui revitalisasi pabrik pupuk dengan jaminan pasokan bahan baku gas.
- Mengutamakan produksi pupuk oleh Produsen BUMN untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (subsidi dan non subsidi)
- Memperkecil perbedaan (disparitas) harga pupuk antara subsidi dan non subsidi, dengan menaikkan HET pupuk secara gradual.
- Pengalihan pola subsidi pupuk menjadi subsidi pertanian lainnya yang lebih tepat sasaran (*targeted Subsidies*), menuju pasar bebas

- Sinkronisasi peraturan dalam pengelolaan subsidi pupuk dari seluruh instansi terkait, sehingga petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhannya, ketahanan pangan dapat ditingkatkan dan industri pupuk dapat berkelanjutan dan mempunyai daya saing tinggi.

2. Bantuan Langsung Pupuk (BLP)

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, diperlukan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui penerapan penggunaan pupuk majemuk NPK dan pupuk organik granul dan cair. Dan untuk meningkatkan penggunaan pupuk tersebut di tingkat petani, pada tahun 2009, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Pupuk termasuk pendampingan dan pengawalan pelaksanaannya.

Keberhasilan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bekerjasama dengan PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri selaku pelaksana kegiatan Bantuan Langsung Pupuk telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Menyusun Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk TA 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/SR.130/9/2009 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/SR.130/12/2009.
- Telah dilaksanakan penyaluran pupuk BLP oleh PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri kepada petani yaitu: Pupuk Organik Granul 191.733.975 kg, Pupuk Organik Cair 1.278.227 Liter, dan NPK 63.911.325 Ton.
- Dengan adanya bantuan pupuk, telah memperluas penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk di tingkat petani serta meningkatkan produksi padi.

Kegagalan

- Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung pupuk tahun 2009 disebabkan beberapa kendala, baik administratif maupun teknis. Kendala administratif antara lain: proses penyiapan DIPA dan penetapan spesifikasi mutu pupuk serta penentuan calon petani dan lokasi (CPCL), sedangkan kendala teknis antara lain adalah: penetapan produsen pupuk yang merupakan produsen pupuk skala usaha kecil dan menengah mampu memenuhi spesifikasi pupuk yang ditetapkan, penyaluran BLP kepada petani yang memerlukan waktu cukup lama, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.
- Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi kegiatan BLP, khususnya di tingkat kabupaten, belum optimal sehingga penyerapan anggaran pendampingan masih rendah.

Langkah Antisipatif

- Mempercepat proses penyiapan DIPA dan penentuan CPCL oleh Dinas Pertanian agar pelaksanaan kegiatan BLP dapat dilaksanakan pada awal tahun 2010.
- Meningkatkan kinerja produsen pupuk untuk BLP, dan mendorong pembangunan pabrik pupuk di sentra produksi padi agar produksi penyaluran pupuk BLP dapat lebih cepat.

3. Pembinaan dan Pendampingan BLP

Agar bantuan pupuk dapat diterima oleh petani sasaran, dilaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap program Bantuan Langsung Pupuk melalui kegiatan Pembinaan dan Pendampingan BLP.

Keberhasilan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bekerjasama dengan PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri selaku pelaksana kegiatan Bantuan Langsung Pupuk telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Menyusun Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk TA 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/SR.130/7/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/SR.140/12/2009;
- Menetapkan dan mengangkat Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP TA 2009 melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.I.SET/SK/59/III/2009 serta melaksanakan survey harga ke 13 provinsi.
- Membentuk Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Kegiatan BLP Tahun 2009 melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No, I.SET/SK/58/III/2009; serta melaksanakan pemeriksaan pupuk di pabrik pupuk mitra PT. Pertani dan PT. SHS..
- Menetapkan dan mengangkat Tim Verifikasi Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP TA 2008 melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.I.SET/SK/57/III/2009; serta melaksanakan verifikasi dokumen sebanyak 7 kali

Kegagalan

- Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan langsung pupuk tahun 2009 disebabkan beberapa kendala antara lain dalam penetapan spesifikasi mutu pupuk organik untuk kegiatan BLP. Kondisi ini menyebabkan sosialisasi dan koordinasi kegiatan menjadi kurang optimal, sebagian petani penerima bantuan benih telah melaksanakan tanam sehingga bantuan pupuk baru dapat digunakan pada musim tanam berikutnya (Oktober-Desember)

- Sebagian besar mitra kerja PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri dalam memproduksi pupuk BLP adalah produsen pupuk skala usaha kecil dan menengah dengan bahan baku yang beragam sehingga kualitas fisik pupuk juga beragam, khususnya pupuk organik granul.

Langkah Antisipatif

- Melakukan pengawalan secara maraton agar bantuan pupuk dapat disalurkan ke kelompok sasaran pada musim tanam rendeng.
- Melakukan seleksi dan pembinaan kepada mitra kerja produsen pupuk agar dapat menghasilkan pupuk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Pengawasan Pupuk

Pengawasan pupuk yang dilakukan selama ini belum dapat mengimbangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat lapang. Hal ini disebabkan antara lain belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida, serta belum optimalnya kinerja KP3 tersebut karena tidak tersedianya dana operasional yang memadai, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Untuk mendorong terbentuknya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida serta mengoptimalkan kinerjanya, pada Tahun 2009 Pemerintah mengalokasikan anggaran pengawasan ke 33 provinsi dan 494 kabupaten masing-masing sebesar Rp. 50 juta dan Rp 34 juta.

Keberhasilan

- Meningkatnya jumlah KP3 tingkat provinsi dari 30 menjadi 33 dan meningkatnya jumlah KP3 tingkat kabupaten dari 295 menjadi 392 pada tahun 2009

- Terlaksananya koordinasi dan pengawasan pupuk oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di 30 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota

Kegagalan

Masih rendahnya pemanfaatan anggaran pengawasan yang dialokasikan kepada KP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini disebabkan antara lain :

- Proses administrasi yang cukup panjang dan memerlukan waktu yang lama sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi relatif singkat, yaitu hanya \pm 3 bulan.
- Kurang optimalnya sosialisasi sehingga pemahaman dan kesiapan petugas daerah dalam memanfaatkan dana operasional tersebut menjadi kurang optimal dan tidak semua daerah memanfaatkannya.

Langkah Antisipatif

- Meningkatkan peran KP3 dalam pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida dengan menyiapkan dukungan sarana serta anggaran yang memadai.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada TA 2009, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat tugas untuk mengelola kegiatan subsidi yang dibiayai melalui mata anggaran 062 sebesar Rp 17.534.724.175.860,- Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp. 15.237.484.287.702,- atau 86,90 % dari jumlah anggaran. Secara rinci rencana dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun 2009

No.	Program/Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pembayaran Subsidi Pupuk	16.458.767.696.000	14.194.522.701.530	86,24
	PT. Pusri	3.485.777.026.000	2.868.442.217.829	82,29
	PT. Pupuk Kaltim	2.528.848.007.000	2.272.291.881.631	89,85
	PT. Pupuk Kujang	1.919.222.931.000	1.448.604.387.129	75,48
	PT. Petrokimia	8.375.409.822.000	7.451.073.357.964	88,96
	PT. PIM	149.509.907.000	154.110.856.976	103,08
2.	Pembayaran BLP	1.030.103.142.000	1.015.447.331.572	98,58
	▪ PT. Pertani	586.969.360.000	572.314.041.780	97,50
	▪ PT. SHS	443.133.782.000	443.133.289.792	100,00
3.	Pendampingan BLP	26.714.406.000	19.537.408.091	73,13
	▪ PT. Pertani	15.819.821.000	9.509.272.412	60,11
	▪ PT. SHS	10.894.585.000	10.028.135.679	92,05
4.	Pengawasan Pupuk	19.138.935.860	7.976.846.509	41,68
	▪ Pusat	940.928.500	597.261.059	63,48
	▪ Provinsi (30 Prov)	1.686.000.000	1.157.691.600	68,66
	▪ Kabupaten/Kota (250 Kab/Kt)	16.512.007.360	6.221.893.850	37,68
	Jumlah	17.534.724.179.860	15.237.484.287.702	86,90